

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja di Indonesia. Perlindungan ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional yang adil dan berkelanjutan.

Program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan mempunyai peran penting dalam melindungi pekerja, namun kepatuhan terhadap pembayaran iuran masih rendah sehingga menjadi tantangan yang harus diatasi untuk menjamin keberlanjutan program. (Novitasari, 2024).

Dalam kegiatannya, BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) memiliki empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditawarkan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK). Dalam program tersebut diwajibkan bagi peserta atau perusahaan untuk melakukan pembayaran iuran secara tepat waktu setiap bulan. Dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan berasal dari iuran peserta tersebut. Dana yang dikumpulkan kemudian dikelola dengan diinvestasikan untuk membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mendapatkan nilai tambah bagi para pekerja. Kecilnya iuran yang didapatkan oleh Jamsostek akan berpengaruh dalam mengelola dan menginvestasikan dana Jamsostek.

Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 pasal 4 ayat 2 bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, di dalam petikan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 2 juga dijelaskan bahwa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Namun, pada praktiknya masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ketidakpatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman perusahaan terhadap regulasi, kurangnya pengawasan, hingga kesengajaan untuk menghindari beban biaya tambahan. Ketidak patuhan ini tidak hanya merugikan tenaga kerja yang kehilangan hak atas perlindungan sosial, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap citra dan keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memiliki prosedur kepatuhan yang jelas dan terstruktur dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Prosedur ini mencakup mekanisme internal perusahaan dalam melakukan pelaporan, perhitungan iuran, serta pembayaran secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap pembayaran iuran BPJS dipengaruhi oleh efektivitas sistem administrasi perusahaan, pemahaman terhadap regulasi, serta peran pengawasan dari instansi terkait. Dengan demikian, kajian terhadap prosedur kepatuhan ini penting dilakukan untuk memperkuat implementasi perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia.

Kecilnya akumulasi iuran bukan saja akibat banyak perusahaan yang belum menjadi peserta, melainkan rendahnya gaji atau upah yang diterima tenaga kerja serta akibat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pengusaha berkaitan dengan pelaporan upah yang sebenarnya. Namun, belum tentu semua peserta telah membayar iuran tepat waktu. Meskipun diterapkan denda bagi keterlambatan pembayaran iuran, masih banyak perusahaan yang menunggak atau terlambat membayar iuran. Pihak BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) harus mengontrol peserta dengan mengirim surat dan menelepon ke masing-masing peserta untuk melakukan pembayaran iuran. Penunggakan pembayaran iuran juga berpengaruh pada manfaat program jaminan sosial. Anggraini (2021)

Dari hasil wawancara pada salah satu karyawan BPJSTK Cabang Jambi

Kota, diperoleh informasi mengenai manfaat dana program jaminan sosial. Ia menjelaskan bahwa apabila perusahaan menunggak membayar iuran, mereka tetap mendapat manfaat jaminan sosial selama karyawan yang bersangkutan belum dikeluarkan, hanya saja manfaatnya akan tertunda.

Karyawan tersebut mendapat santunan, tetapi BPSJTK belum dapat membayarkan karena pada Maret belum ada iuran yang masuk. Setelah iuran dibayarkan, santunan baru dapat dicairkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dianalisis terkait prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja dan unsur pengendalian internal pada iuran upah tenaga kerja agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Suatu organisasi memiliki beberapa faktor yang saling terkait dan berpengaruh dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor penting tersebut adalah sumber daya manusia yang dapat mengoptimalkan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia dirasakan sangat penting dalam suatu perusahaan selain modal. Karena pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk mendapatkan karyawan-karyawan yang handal dan mampu melaksanakan tugasnya secara benar dan bertanggung jawab, maka hal ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya secara cepat.

Didalam pengelolaan SDM, apabila individu dalam organisasi yaitu sumber daya manusianya dapat berjalan efektif maka organisasi tetap berjalan efektif. Beberapa kegiatan pengelolaan SDM misalnya pengadaan, penilaian, perlindungan, memotivasi karyawan, memberdayakan pegawai, peningkatan disiplin, bimbingan, dll. Pengelolaan dan pengoptimalan sumber daya manusia tidak lepas dari faktor karyawan. Organisasi harus mempunyai karyawan-karyawan mempunyai kinerja yang baik. Dengan kata lain kelangsungan suatu organisasi ditentukan oleh kinerja karyawannya. (Rohana Manalu et al., 2021)

kualitas layanan relaksasi klaim juga menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi kepatuhan peserta dalam melakukan pembayaran iuran BPJS. Kualitas pelayanan yang baik dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan terutama dalam mendapatkan hak-haknya. Sehingga kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan peserta dalam

membayar iuran. (Novitasari, Lasiyono, & Firdausia, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang telah diuraikan maka dapat di Rumuskan Masalah :

1. Bagaimana Prosedur Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagkerjaan Jambi yang Sedang diterapkan?
2. Bagaimana Prosedur Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagkerjaan Jambi yang Sedang Berlaku?
3. Apakah Prosedur kepatuhan Pembayran Iuran BPJS Ketenagkerjaan Jambi yang diterapkan sudah Sesuai dengan yang berlaku?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui prosedur yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran iuran.
2. Mengetahui prosedur di BPJS Ketenagakerjaan Jambi dalam melaksanakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengetahui Apakah Prosedur Kepatuhan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Jambi yang diterapkan sudah sesuai dengan yang berlaku ?

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis

BPJS Ketenagakerjaan Jambi Meningkatkan wawasan, pengetahuan tentang Prosedur Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJSTK di Jambi dan mendapatkan ilmu kerja terkait Prosedur Kepatuhan Pembayaran Iuran

2. Manfaat bagi pembaca

Sebagai informasi, wawasan, dan pengetahuan lain yang mungkin

diperlukan untuk melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini.

3. Manfaat bagi perusahaan

Untuk informasi dan saran kepada BPJSTK Jambi akan mengkaji perbaikan apa saja yang dapat dilakukan Terhadap Kepatuhan Perusahaan dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi.

4. Manfaat bagi masyarakat

Sebagai informasi mengenai Prosedur Kepatuhan Perusahaan dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi untuk memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat di Wilayah Jambi.

1.4 Metode Penulisan

Untuk mendapatkan data dalam penulisan ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Data

1. Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu hasil pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kegiatan observasi selama pelaksanaan magang di BPJS Ketenagakerjaan Jambi. Observasi ini dilakukan untuk memahami secara langsung proses dan prosedur pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan serta tingkat kepatuhan perusahaan dalam menjalankannya.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang sudah tersedia pada dokumen perusahaan maupun sumber-sumber lain, terutama melalui studi kepustakaan. Data ini mencakup literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data sekunder digunakan untuk mendukung dan melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan

Penulis melakukan pengamatan langsung selama kegiatan magang di BPJS Ketenagakerjaan Jambi untuk memperoleh gambaran nyata mengenai prosedur pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan serta tingkat kepatuhan perusahaan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak terkait seperti Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Memperoleh Informasi terkait penulisan tugas akhir.

3. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen internal perusahaan seperti laporan pembayaran iuran, bukti setor BPJS, serta kebijakan internal terkait jaminan sosial tenaga kerja.

1.4.3 Metode Analisa

Penulisan laporan tugas akhir dilakukan dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif (Menganalisis, Menggambarkan, dan Meringkas berbagai Kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan).

1.5 Lokasi dan Waktu Magang

Nama Perusahaan : BPJS Ketenagakerjaan

Alamat :Jl. Slamet Riyadi/Broni No. 16, Kel. Solok Sipin,
Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36121.

Waktu : 13 Februari – 30 April 2025

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam laporan ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta metode yang digunakan dalam penulisan, pengumpulan data, dan analisis. Selain itu, juga disertakan informasi mengenai waktu dan lokasi magang serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, dijelaskan secara mendalam mengenai teori-teori yang menjadi dasar dalam pemecahan masalah penelitian.

BAB III: DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat data umum dan data khusus dari perusahaan tempat magang. Data umum memberikan gambaran istilah mengenai perusahaan dan bidang kerja pada posisi magang, sedangkan data khusus berisi deskripsi tentang hasil observasi dan penemuan lapangan yang relevan dengan topik yang dibahas.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab ini, disajikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilaksanakan pada bab sebelumnya, yang disusun berdasarkan rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga menyampaikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi perusahaan atau pihak-pihak terkait